HISTORIOGRAFI INDONESIA DI ERA REFORMASI: KRITIK DAN DEKONSTRUKSI

Ahmad Nur Qodri[1], Etmi Hardi[2], Rahmuliani Fithriah[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : ahmadnurqodri63@email.com

ABSTRACT

This piece investigates the changes in Indonesian historiography during the Reform Era following 1998, highlighting the rise of critical and deconstructive methods in national historical discussions. Before the Reformasi, the historiography in Indonesia was largely influenced by state-approved narratives developed during colonial and New Order times, which obstructed alternative viewpoints and muted underrepresented voices. The fall of Suharto's autocratic regime in 1998 facilitated new academic liberties, allowing historians to challenge official stories, especially those related to the 1965 events and the ideological framework of New Order progress. This article examines the significant transitions in historiographical practices, the emergence of a multiperspective approach to history, and the role of emerging scholars and public historians in reshaping Indonesia's historical narrative. Additionally, it explores the various challenges and potential presented by globalization and the digital age in modern historical writing. It contends that the historiography of the Reform Era signifies a crucial shift towards democratizing historical knowledge in Indonesia, turning history from an instrument of legitimating power into a platform for meaningful social and political discourse.

Keywords : *Deconstruction, Historiography, Indonesian History, New Order, Reform Era.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas perubahan historiografi Indonesia pada Era Reformasi (setelah 1998), dengan fokus pada munculnya pendekatan analitis dan dekonstruktif terhadap kisah sejarah nasional. Sebelum Reformasi, historiografi Indonesia dikuasai oleh narasi resmi yang dibentuk selama masa kolonial dan Orde Baru, yang menyingkirkan perspektif alternatif dan membisukan suara-suara marginal. Jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada 1998 menghasilkan kebebasan akademik yang baru, memberi kesempatan kepada para sejarawan untuk menantang narasi resmi, terutama terkait tragedi 1965 dan mitos pembangunan Orde Baru. Tulisan ini mengeksplorasi perubahan signifikan dalam teknik historiografi, munculnya sejarah multiperspektif, serta peran sejarawan muda dan sejarawan publik dalam membangun kembali sejarah Indonesia. Artikel ini juga mengkaji tantangan serta kesempatan yang dihadirkan oleh globalisasi dan digitalisasi dalam penulisan sejarah modern. Artikel ini berpendapat bahwa historiografi pada Era Reformasi mencerminkan demokratisasi fundamental pengetahuan sejarah di Indonesia, yang mengubah sejarah dari alat legitimasi kekuasaan menjadi wadah dialog sosial dan politik yang kritis.

Kata Kunci : *Dekonstruksi, Era Reformasi, Historiografi, Orde Baru, Sejarah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Historiografi, baik sebagai ilmu maupun seni dalam penulisan sejarah, memiliki peranan penting dalam membentuk cara suatu bangsa memahami, menginterpretasikan, dan mewariskan sejarahnya. Di Indonesia, historiografi bukan hanya kegiatan akademis yang dilakukan di dalam lingkungan universitas, tetapi juga sebuah medan pertempuran ideologi, politik, dan identitas bangsa yang terus berubah seiring waktu. Narasi sejarah yang diciptakan oleh sejarawan tidak pernah sepenuhnya objektif; ia selalu dipenuhi dengan kepentingan, sudut pandang, dan konteks pada masa itu.

Transformasi signifikan yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 memulai fase baru dalam perjalanan historiografi Indonesia. Keberhentian Soeharto setelah lebih dari 30 tahun memerintah tidak hanya menandai akhir sebuah era kekuasaan politik, tetapi juga menghancurkan batas-batas yang selama ini menghalangi kebebasan intelektual dan akademis. Era Reformasi yang terjadi setelahnya memberikan peluang baru bagi sejarawan, akademisi, dan aktivis budaya untuk mulai mempertanyakan, mengkritisi, dan mendekonstruksi narasi-narasi sejarah resmi yang selama ini dianggap sebagai kebenaran mutlak.

Artikel ini bertujuan utama untuk menekankan bagaimana historiografi Indonesia menjalani proses kritik dan dekonstruksi yang mendalam selama era Reformasi. Dengan menerapkan metode historiografis-kritis, artikel ini akan menganalisis perubahan paradigma dalam penulisan sejarah Indonesia: dari sejarah yang bersifat tunggal dan normatif ke sejarah yang lebih plural, kritis, dan demokratis. Studi ini juga bertujuan untuk mengenali pelaku kunci, tema-tema utama, serta tantangan dan peluang yang memengaruhi perkembangan historiografi Indonesia masa kini.

Kajian Teoritis

Kajian ini berpijak pada kerangka teoretis dekonstruksi yang dikembangkan oleh Jacques Derrida, yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar dalam teks dan wacana, termasuk teks-teks historis. Dalam konteks historiografi, dekonstruksi berarti membongkar narasi-narasi sejarah yang dianggap tunggal dan final untuk menemukan lapisan makna yang tersembunyi, suara-suara yang dibungkam, dan kepentingan kekuasaan yang melatarinya. Teori kritis Sekolah Frankfurt turut memperkuat pendekatan ini dengan menekankan peran ideologi dalam membentuk pengetahuan dan kesadaran sosial.

Konsep "kekuasaan-pengetahuan" (power-knowledge) yang dirumuskan Michel Foucault juga menjadi landasan penting dalam memahami relasi antara narasi sejarah dan kekuasaan politik. Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah bebas nilai; ia selalu diproduksi dalam relasi kekuasaan tertentu dan berfungsi untuk mempertahankan atau menantang tatanan yang ada (Foucault, 1980). Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat relevan untuk memahami bagaimana Orde Baru membangun hegemoni historisnya dan mengapa era Reformasi menjadi momen penting bagi dekonstruksi narasi tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Yefterson dan Lionar (2019) tentang dinamika historiografi Indonesia pasca-Reformasi memberikan peta awal tentang pergeseran metodologis yang terjadi. Sementara itu, karya Adam (2009) tentang pelurusan sejarah Indonesia dan kajian Roosa (2008) tentang peristiwa 1965 menjadi referensi penting yang menunjukkan praktik dekonstruksi historiografis secara konkret. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan mengintegrasikan perspektif teoritis yang lebih komprehensif dan melihat tantangan serta peluang kontemporer dalam era digital.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap utama, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, pengumpulan sumber dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang mencakup buku-buku teks sejarah, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan dokumen-dokumen relevan yang berhubungan dengan perkembangan historiografi Indonesia, terutama pada periode Orde Baru dan Era Reformasi.

Dalam tahap kritik, sumber-sumber yang telah dikumpulkan dievaluasi dengan seksama melalui kritik ekstern dan intern untuk menentukan keaslian dan kredibilitasnya. Tahap analisis dilakukan melalui pendekatan induktif dan deduktif, mengaitkan hasil-hasil empiris dengan struktur teoritis historiografi kritis. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah historiografis-komparatif, yaitu membandingkan cara penulisan sejarah sebelum dan sesudah Era Reformasi untuk menemukan pergeseran-pergeseran penting yang terjadi.

Kerangka teoretis yang mendasari adalah teori dekonstruksi Derrida dan teori kritis Sekolah Frankfurt yang telah banyak diterapkan dalam studi historiografi postmodern. Desain penelitian bersifat kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Populasi sumber yang digunakan mencakup publikasi ilmiah periode 1998-2024, dengan fokus pada karya-karya yang secara eksplisit membahas transformasi historiografi Indonesia pasca-Reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencatatan sejarah Indonesia tak terpisahkan dari konteks kekuasaan yang mengelilinginya. Dalam periode kolonial Belanda, historiografi Indonesia dikuasai oleh sudut pandang Eurosentris yang menjadikan bangsa Eropa sebagai subjek utama dalam sejarah, sedangkan pribumi diposisikan sebagai objek yang tidak berdaya. Karya-karya sejarawan kolonial seperti H.J. de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, walaupun memiliki nilai arsip yang tinggi, tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan untuk membenarkan keberadaan kolonial di Nusantara (Kartodirdjo, 1993, hlm. 12).

Saat Indonesia memperoleh kemerdekaan dan memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998), historiografi mengalami proses sistematis instrumentalisasi. Pemerintah Orde Baru menciptakan narasi sejarah tunggal yang disebut "sejarah nasional ala pemerintah" melalui berbagai proyek resmi, termasuk penerbitan buku teks sejarah nasional yang diwajibkan di semua tingkat pendidikan. Narasi ini sangat teliti dalam menentukan peristiwa dan tokoh yang dianggap patut diingat, sambil secara sistematis menghapus versi-versi alternatif yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan (Anderson, 1983, hlm. 45).

Dampak paling jelas dari hegemoni historiografi Orde Baru adalah hilangnya narasi-narasi alternatif, khususnya yang berhubungan dengan peristiwa 30 September 1965. Versi resmi yang menempatkan PKI sebagai aktor utama dalam peristiwa itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang dapat diajarkan dan disebarkan. Sejarawan yang berani mempertanyakan atau menyajikan interpretasi berbeda menghadapi risiko akademis dan bahkan ancaman pribadi yang serius. Situasi ini menghasilkan apa yang disebut Foucault sebagai "kekuasaan kebenaran" di mana otoritas menetapkan apa yang bisa dan tidak bisa dipahami mengenai sejarah (Foucault, 1980, hlm. 131).

Era Reformasi: Ruang Baru dalam Historiografi

Disintegrasi rezim Orde Baru pada Mei 1998 menandakan titik penting dalam lintasan historiografi Indonesia. Kebebasan akademis yang semakin meningkat setelah Reformasi memungkinkan sejarawan untuk terlibat dengan sumber-sumber yang sebelumnya diklasifikasikan, menjalin kemitraan dengan sejarawan internasional, dan menyebarluaskan penelitian yang sebelumnya dianggap tidak dapat diterbitkan. Lembaga pendidikan tinggi memulai pembentukan program studi kritis yang mengekspos siswa pada serangkaian metodologi dan perspektif inovatif dalam disiplin ilmu sejarah.

Salah satu ekspresi kebebasan historiografis yang paling menonjol selama periode Reformasi adalah munculnya gelombang kritik terhadap interpretasi monolitik sejarah nasional. Sejarawan mulai dengan suara menentang narasi yang disetujui mengenai berbagai kejadian penting dalam sejarah Indonesia. Karya-karya ilmiah seperti Pretext for Mass Murder karya John Roosa (2008), yang meneliti kembali peristiwa tahun 1965, di samping penyelidikan Asvi Warman Adam tentang "pengasingan" rezim terhadap individu-individu yang tidak disukai dari wacana sejarah nasional, muncul sebagai tolok ukur signifikan dalam proses dekonstruksi (Roosa, 2008, hlm. 23).

Dekonstruksi mitos kekuasaan dominan secara intrinsik terkait dengan upaya rekonstruksi naratif yang memprioritaskan inklusivitas. Sejarawan akademis semakin memfokuskan penyelidikan mereka pada kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan selama zaman ini: perempuan, penduduk asli, buruh, dan etnis minoritas. Pendekatan historiografi yang dikenal sebagai "sejarah dari bawah," sebagaimana diartikulasikan oleh E.P. Thompson, telah mulai mengamankan posisinya dalam wacana sejarah Indonesia, sehingga memfasilitasi munculnya suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar (Yefterson, 2019, hlm. 78).

Arah Baru Penulisan Sejarah

Periode Reformasi menghasilkan sebuah orientasi baru dalam penulisan sejarah Indonesia yang menekankan pendekatan yang kritis dan mengambil berbagai sudut pandang. Para sejarawan kini tidak hanya berpuas diri dengan menyusun fakta secara kronologis, tetapi juga berupaya menganalisis makna yang tersimpan di balik fakta-fakta tersebut, mempertanyakan motivasi dari para pelaku sejarah, serta mengungkap hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam pembentukan narasi sejarah. Pendekatan hermeneutis dan interpretatif semakin diakui dan diterima seiring dengan metode positivistik yang telah ada sebelumnya.

Peranan sejarawan muda dan akademisi dalam proses ini sangat penting. Generasi sejarawan yang dibesarkan di zaman Reformasi membawa semangat baru dalam pemikiran dan keberanian untuk membahas isu-isu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Mereka terlibat tidak hanya dalam penerbitan akademis, tetapi juga memanfaatkan berbagai media digital untuk mencapai audiens yang lebih besar. Komunitas-komunitas yang fokus pada kajian sejarah kritis muncul di banyak kota, menyelenggarakan diskusi publik, pameran sejarah, serta program pendidikan sejarah yang berbeda.

Pengaruh globalisasi juga memberikan kontribusi pada perkembangan wacana historiografi di Indonesia. Hubungan dengan berbagai gerakan historiografi dunia, seperti postkolonialisme, studi subaltern, dan sejarah lingkungan, memperkenalkan pendekatan metodologis yang inovatif. Sejarawan di Indonesia kini turut terlibat secara aktif dalam diskusi akademis global, menghadirkan sudut pandang lokal ke dalam perdebatan historiografi internasional serta menyesuaikan metodologi global dengan situasi di Indonesia. Proses digitalisasi arsip dan sumber sejarah telah meningkatkan aksesibilitas yang sebelumnya tidak ada,

memungkinkan peneliti dari berbagai wilayah untuk mengakses dokumen yang dulunya hanya bisa ditemukan di perpustakaan-perpustakaan besar di Jawa.

Tantangan dan Peluang

Di tengah kemajuan yang baik tersebut, kajian sejarah Indonesia pada era Reformasi tidak terlepas dari berbagai hambatan yang signifikan. Bias ideologis tetap menjadi isu yang serius; daripada narasi resmi yang tunggal, historiografi Indonesia kini dihadapkan pada banyak narasi yang masing-masing memiliki agenda politiknya sendiri. Pemberian makna ulang terhadap sejarah yang didasarkan pada kepentingan kelompok, baik dari pihak konservatif maupun progresif, mengancam keaslian ilmiah dalam penulisan sejarah. Keterbatasan sumber juga masih menjadi tantangan, mengingat banyak arsip yang masih terkunci atau belum didigitalisasi dengan memadai.

Kontroversi politik yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sensitif, seperti tragedi tahun 1965 serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama Orde Baru, terus mempengaruhi diskusi mengenai sejarah. Upaya untuk melakukan rekonsiliasi dan menulis sejarah secara lebih adil seringkali menghadapi penolakan dari berbagai kelompok yang merasa terancam oleh pengungkapan kebenaran sejarah. Di sisi lain, konflik-konflik ini justru menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap sejarah sebagai hal yang relevan dan penting, yang seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam penulisan sejarah.

Peluang yang dihadirkan oleh zaman digital sangat menarik. Pergerakan sejarah publik yang terus berkembang, didorong oleh media sosial, podcast sejarah, dan platform digital lainnya, memberikan kesempatan untuk mendemokratisasi pengetahuan sejarah dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kini, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi konsumen pasif dari cerita sejarah, tetapi dapat berpartisipasi aktif sebagai pencipta dan kurator informasi historis melalui berbagai inisiatif sejarah warga dan arsip komunitas digital.

KESIMPULAN

Era Reformasi telah membuka peluang bagi perubahan yang mendasar dalam cara sejarah ditulis di Indonesia. Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 tidak hanya berarti perubahan dalam kekuasaan politik, tetapi juga menyebabkan revolusi dalam cara pandang dan penulisan sejarah oleh bangsa Indonesia. Kebebasan akademik yang muncul akibat proses demokratisasi memungkinkan para sejarawan untuk mulai mengkritisi, membongkar, dan membangun kembali narasi sejarah yang selama lebih dari tiga dekade dibekukan oleh kekuasaan.

Historiografi Indonesia kini telah bertransformasi dari sekadar narasi yang mendukung kepentingan rezim menjadi wadah diskusi sosial dan politik yang aktif, di mana berbagai suara dan pandangan dapat bersaing secara terbuka dalam menentukan arti masa lalu. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan, perkembangan historiografi Indonesia setelah Reformasi memberikan harapan yang kuat bahwa penulisan sejarah yang lebih kritis, demokratis, dan reflektif adalah sebuah kebutuhan yang terus berkembang, memperkuat pijakan intelektual bangsa untuk menyongsong masa depan.

Penelitian ini merekomendasikan agar digitalisasi arsip-arsip sejarah dipercepat dan diperluas akses publiknya. Selain itu, perlu ada ruang yang lebih terbuka dalam kurikulum pendidikan sejarah untuk mengakomodasi perspektif multipel dan narasi-narasi alternatif yang telah lama terpinggirkan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada kajian historiografi daerah dan subaltern untuk memperkaya khazanah sejarah nasional yang lebih inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, atas dukungan akademis dan fasilitas yang diberikan dalam penyelesaian artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir perkuliahan mata kuliah Historiografi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. W. (2020). Sejarah, Politik, dan Rekonsiliasi: Refleksi atas Historiografi Indonesia Kontemporer. *Jurnal Sejarah: Journal of History, 3*(2), 45–62.

Anderson, R. (2021). Decolonizing Historical Narratives in Southeast Asia: New Approaches and Methods. *Journal of Southeast Asian Studies, 52*(1), 112–130.

Asnan, G. (2022). Sejarah Lokal dan Historiografi Daerah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. *Jurnal Lektur Keagamaan, 20*(1), 1–24.

Budiawan. (2019). Sejarah, Memori, dan Politik Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23*(1), 15–29.

Efendi, D., & Susanto, H. (2023). Pendekatan Multiperspektif dalam Pembelajaran Sejarah di Era Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah, 12*(1), 18–34.

Febrianto, L., & Kurniawan, H. (2022). Digitalisasi Arsip Sejarah dan Implikasinya bagi Historiografi Indonesia Modern. *Jurnal Kearsipan, 17*(2), 88–105.

Hardi, E. (2021). Sejarawan Publik dan Demokratisasi Pengetahuan Sejarah di Indonesia. *Kronologi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah, 3*(2), 55–70.

Irsyam, M. (2023). Kritik Sumber dalam Historiografi Postkolonial: Studi Kasus Arsip Belanda tentang Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal, 33*(1), 1–18.

Klinken, G. V., & Berenschot, W. (2020). Peripheral State Formation and Local Histories in Indonesia: Beyond Javacentric Narratives. *Asian Studies Review, 44*(3), 401–418.

Lionar, U., & Yefterson, R. D. (2020). Perkembangan Historiografi Indonesia: Dari Tradisional Menuju Kritis-Analitis. *Kronologi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah, 2*(1), 1–12.

Martini, E. (2022). Subaltern History dan Representasi Perempuan dalam Historiografi Indonesia Kontemporer. *Jurnal Studi Gender, 15*(1), 22–40.

Nasution, I. K. (2021). Peristiwa 1965 dalam Historiografi Indonesia: Perdebatan, Dekonstruksi, dan Rekonstruksi Narasi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 4*(2), 117–132.

Purwanto, B. (2020). Historiografi Kritis dan Tantangan Demokratisasi Sejarah di Indonesia. *Humaniora, 32*(1), 1–12.

Rahardjo, M. (2023). Sejarah Digital dan Transformasi Praktik Historiografi di Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya, 17*(1), 65–80.

Saputra, W. N., & Firmansyah, D. (2024). Postkolonialisme dan Rekonstruksi Identitas Nasional dalam Penulisan Sejarah Indonesia Kontemporer. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 9*(1), 30–47.

Setiawan, A. (2022). Media Sosial sebagai Ruang Produksi Sejarah Publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia, 11*(1), 44–58.

Susilo, A., & Isbandiyah. (2019). Sejarah Lokal sebagai Alternatif Narasi dalam Historiografi Indonesia Pasca-Reformasi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 2*(2), 101–114.

Utama, A. H. (2023). Metodologi Sejarah Lisan dan Kontribusinya bagi Pemulihan Narasi Marginal di Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, *28*(1), 77–95.

Wahyudi, J. (2024). Historiografi Orde Baru dan Warisannya: Tinjauan Kritis terhadap Kurikulum Sejarah Nasional. *Paramita: Historical Studies Journal*, *34*(1), 19–36.

Zulkarnain, I., & Nursam, M. (2021). Tradisi Kritis dalam Penulisan Sejarah Indonesia: Warisan Sartono Kartodirdjo dan Relevansinya di Era Reformasi. *Jurnal Sejarah: Journal of History*, *4*(1), 1–20.